Politik Islam dan Tantangan Modernitas

Khoirul Huda¹, Adetya Putri Arvia Wulandari², Dinda Aurelia³, Zuldi Yariza M. Matondang⁴, Roni Rahmat Ritonga⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: khoirulhuda@uinsu.ac.id¹, adetya0404211007@uinsu.ac.id²,
dinda0404213024@uinsu.ac.id³, zuldi0404212034@uinsu.ac.id⁴,
roni0404212023@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Politik Islam telah menjadi bagian integral dalam dinamika sosial dan politik di berbagai negara Muslim. Dalam menghadapi tantangan modernitas, politik Islam dihadapkan pada berbagai isu, termasuk globalisasi, sekularisasi, dan perkembangan teknologi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik Islam merespons tantangan modernitas, dengan fokus pada adaptasi ideologi dan praktik politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menggali peran dan tantangan politik Islam dalam era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Islam memiliki potensi untuk beradaptasi dengan modernitas, tetapi masih terdapat hambatan dalam mengharmonisasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reinterpretasi ajaran Islam yang progresif untuk menghadapi tantangan modernitas secara konstruktif.

Kata Kunci: *Politik Islam, Modernitas, Sekularisasi, Globalisasi, Reinterpretasi*

Abstract

Islamic politics has become an integral part of the social and political dynamics in various Muslim-majority countries. In confronting the challenges of modernity, Islamic politics faces numerous issues, including globalization, secularization, and technological advancements. This article aims to analyze how Islamic politics responds to the challenges of modernity, focusing on ideological adaptations and political practices. This research employs a qualitative approach using a literature review method to explore the roles and challenges of Islamic politics in the modern era. The findings reveal that Islamic politics has the potential to adapt to modernity, yet obstacles remain in harmonizing traditional values with contemporary demands. The article concludes that a progressive reinterpretation of Islamic teachings is essential to address the challenges of modernity constructively.

Keywords: *Islamic Politics, Modernity, Secularization, Globalization, Reinterpretation*

PENDAHULUAN

Politik Islam memiliki sejarah panjang yang berakar dari masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Dalam konteks global, politik Islam menjadi pusat perhatian seiring dengan munculnya berbagai gerakan Islam politik seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaat-e-Islami, hingga partai-partai politik berbasis Islam di Indonesia seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, modernitas telah membawa tantangan baru bagi politik Islam, termasuk isu demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia (Arifullah, 2015).

Modernitas yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menuntut transformasi berbagai aspek kehidupan, termasuk politik Islam. Namun, banyak yang berpendapat bahwa politik Islam sering kali dianggap konservatif dan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana politik Islam merespons tantangan modernitas dan apakah ia mampu tetap relevan di tengah dinamika global.

Politik Islam merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Dalam tradisi Islam, agama tidak hanya

dipahami sebagai sebuah sistem spiritual, tetapi juga sebagai panduan menyeluruh untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Pemikiran mengenai politik Islam berakar pada keyakinan bahwa nilai-nilai syariat harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tokoh seperti Abul A'la Maududi mengemukakan bahwa tujuan utama politik Islam adalah menegakkan syariat Allah sebagai pedoman hidup, yang mencakup dimensi keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial. Namun, penerapan konsep ini tidak bisa dilepaskan dari tantangan-tantangan modernitas, yang sering kali memaksa politik Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi akibat globalisasi.

Modernitas, yang secara umum merujuk pada era transformasi yang dimulai dengan revolusi industri, telah membawa perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Modernitas tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan bagi tradisi-tradisi lama, termasuk Islam. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi politik Islam dalam konteks modernitas adalah sekularisasi. Sekularisasi menuntut pemisahan antara agama dan negara, sebuah gagasan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam, di mana agama dan politik dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam masyarakat modern, tekanan untuk memisahkan agama dari kehidupan publik sering kali menciptakan dilema bagi kaum Muslim yang ingin menegakkan nilai-nilai Islam dalam sistem politik (Boli, 2018).

Tantangan lain yang muncul dari modernitas adalah pluralisme. Masyarakat modern yang semakin global dan multikultural menghadirkan situasi di mana politik Islam harus berhadapan dengan keberagaman keyakinan dan nilai-nilai. Dalam konteks ini, politik Islam dituntut untuk mampu menyikapi perbedaan tanpa kehilangan esensinya sebagai sistem yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Pluralisme sering kali menjadi medan ujian bagi politik Islam, terutama dalam menjaga keseimbangan antara menjaga identitas Islam dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang heterogen.

Selain sekularisasi dan pluralisme, demokratisasi juga menjadi tantangan besar bagi politik Islam. Demokrasi, dengan prinsip kedaulatan rakyatnya, sering kali dipandang bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan yang menjadi dasar politik Islam. Namun, sejumlah pemikir Muslim modern berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas, dapat diakomodasi dalam sistem demokrasi. Dalam pandangan ini, demokrasi dipahami bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, politik Islam harus mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi tanpa kehilangan prinsip-prinsipnya (Huda, 2007).

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, reinterpretasi ajaran Islam menjadi salah satu strategi penting. Reinterpretasi Islam, atau sering disebut sebagai ijtihad, adalah proses memahami kembali ajaran agama dalam konteks yang relevan dengan kebutuhan zaman. Fazlur Rahman, salah satu tokoh pemikir Islam modern, menekankan pentingnya ijtihad sebagai sarana untuk menjaga relevansi Islam di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat. Menurut Rahman, Islam harus dipahami sebagai sistem nilai yang dinamis dan kontekstual, bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku dan statis.

Nasr Hamid Abu Zaid, seorang pemikir Muslim kontemporer lainnya, menawarkan pendekatan hermeneutik dalam memahami teks-teks keagamaan. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai teks yang hidup, yang maknanya dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial dan sejarah. Pendekatan ini membuka ruang untuk menafsirkan kembali ajaran Islam, termasuk dalam bidang politik, agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Misalnya, konsep syura dalam Islam, yang pada awalnya dipahami sebagai musyawarah antara para pemimpin, dapat ditafsirkan ulang sebagai prinsip partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik.

Reinterpretasi ajaran Islam juga memungkinkan terjadinya dialog antara tradisi Islam dan prinsip-prinsip modernitas. Dalam konteks politik, hal ini dapat terlihat dalam upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan gender ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan progresif. Pendekatan ini tidak hanya menjaga relevansi politik Islam di era modern, tetapi juga membantu menciptakan harmoni antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan

zaman. Dengan cara ini, politik Islam dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong perdamaian dan keadilan global, tanpa kehilangan identitasnya sebagai bagian dari tradisi Islam (Haryati & Kosim, 2010).

Selain itu, reinterpretasi Islam dalam politik juga dapat menjadi sarana untuk menjawab kritik-kritik terhadap politik Islam yang sering kali dianggap tidak kompatibel dengan nilai-nilai modernitas. Dengan menampilkan wajah Islam yang inklusif, toleran, dan progresif, politik Islam dapat membangun citra positif di mata masyarakat global. Dalam hal ini, dialog antaragama dan antarbudaya menjadi sangat penting, terutama dalam dunia modern yang semakin terhubung (Ikhwan, 2019).

Namun, upaya reinterpretasi ajaran Islam ini tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah resistensi dari sebagian kelompok Muslim yang menganggap reinterpretasi sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Kelompok-kelompok ini sering kali memandang reinterpretasi sebagai ancaman terhadap tradisi, yang dapat melemahkan otoritas agama. Untuk mengatasi resistensi ini, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, yang melibatkan dialog antara berbagai kelompok dalam masyarakat Muslim.

Konsep Politik Islam

Politik Islam adalah konsep yang memadukan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Akar dari politik Islam terletak pada keyakinan bahwa Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Menurut Abul A'la Maududi, tujuan utama politik Islam adalah menegakkan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maududi berpendapat bahwa pemerintahan dalam Islam adalah teokrasi demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan Allah, tetapi dijalankan oleh manusia dengan dasar musyawarah (syura) (Krisdiyanto et al., 2019).

Yusuf al-Qaradawi menambahkan dimensi fleksibilitas dalam penerapan politik Islam. Baginya, Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks zaman dan tempat tanpa kehilangan esensinya. Dalam pandangannya, penerapan politik Islam harus mempertimbangkan dinamika masyarakat modern yang plural dan kompleks. Ia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan dialogis dalam menyikapi perbedaan pendapat, baik dalam kalangan umat Islam sendiri maupun dengan masyarakat non-Muslim. Dengan demikian, politik Islam tidak hanya berkuat pada penerapan hukum syariat secara kaku, tetapi juga pada upaya menciptakan keadilan sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Modernitas dan Tantangannya

Modernitas adalah transformasi sosial, budaya, dan politik yang terjadi akibat industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Dalam konteks politik Islam, modernitas membawa berbagai tantangan yang kompleks, seperti sekularisasi, pluralisme, dan demokratisasi. Sekularisasi, misalnya, menuntut pemisahan antara agama dan negara, sebuah konsep yang sering kali bertentangan dengan pandangan politik Islam tradisional yang mengintegrasikan agama dalam kehidupan publik.

Pluralisme menjadi tantangan lain bagi politik Islam dalam dunia modern. Anthony Giddens mencatat bahwa modernitas sering kali menciptakan konflik dengan tradisi karena adanya tekanan untuk mengubah cara berpikir dan bertindak agar lebih rasional dan universal. Dalam masyarakat modern yang multikultural, politik Islam harus mampu merespons keberagaman ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan inklusif dan toleran terhadap perbedaan menjadi kunci untuk menjaga relevansi politik Islam di era modern (Malli, 2021).

Demokratisasi adalah tantangan berikutnya yang dihadapi politik Islam. Demokrasi, yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, sering kali dianggap bertentangan dengan konsep kedaulatan Tuhan dalam Islam. Namun, sejumlah pemikir Muslim, seperti Rachid Ghannouchi, mencoba menjembatani kesenjangan ini dengan menyatakan bahwa demokrasi dapat selaras dengan Islam jika dipahami sebagai mekanisme untuk menegakkan prinsip keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas. Dalam pandangan ini, demokrasi bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik.

Reinterpretasi Islam dalam Politik

Salah satu respons terhadap tantangan modernitas adalah upaya reinterpretasi ajaran Islam. Reinterpretasi Islam adalah proses memahami kembali ajaran agama dalam konteks yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern, menekankan pentingnya ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam dalam isu-isu kontemporer. Ia percaya bahwa ijtihad adalah kunci untuk menjaga relevansi Islam di tengah perubahan sosial dan budaya yang cepat.

Nasr Hamid Abu Zaid, di sisi lain, menyoroti pentingnya pendekatan hermeneutik dalam memahami teks-teks keagamaan. Menurutnya, Al-Qur'an dan Hadis harus dipahami sebagai teks yang hidup, yang maknanya dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial dan sejarah. Pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat (Maarif, 2016).

Dalam konteks politik, reinterpretasi Islam memungkinkan terjadinya transformasi tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya. Sebagai contoh, konsep syura dalam Islam dapat dipahami ulang sebagai prinsip partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Demikian pula, nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi inti dari syariat dapat diadaptasi dalam kebijakan publik yang inklusif dan progresif. Reinterpretasi juga membuka ruang untuk dialog antaragama dan antarbudaya, yang sangat penting dalam dunia modern yang plural. Dengan pendekatan ini, politik Islam dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong perdamaian dan keadilan global, tanpa kehilangan identitasnya sebagai bagian dari tradisi Islam (Munajah, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik politik Islam dan modernitas. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami fenomena politik Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

Subjek penelitian meliputi studi kasus politik Islam di berbagai negara Muslim, seperti Indonesia, Mesir, dan Turki. Ketiga negara ini dipilih karena memiliki pengalaman yang kaya dalam mengintegrasikan politik Islam dengan modernitas. Data dianalisis dengan menggunakan kerangka teori politik Islam dan modernitas untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Islam dan Modernitas di Indonesia

Politik Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan dinamis, sejak masa kolonial hingga era reformasi. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengalaman unik dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik modern. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas politik Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Sejak awal kemerdekaan, perdebatan mengenai posisi Islam dalam konstitusi dan sistem politik Indonesia telah menjadi salah satu isu utama. Dalam perkembangannya, politik Islam di Indonesia menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi modern, meskipun tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk radikalisme dan intoleransi (Munir, 2017).

Partai-partai politik berbasis Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjadi contoh konkret bagaimana politik Islam mampu berperan aktif dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kedua partai ini, meskipun berakar pada ideologi Islam, telah menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius. PKS, misalnya, telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam kampanye politiknya, dengan fokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan pemberantasan korupsi yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang agama atau latar belakang. Sementara itu, PPP, yang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, terus berupaya untuk menjaga relevansinya dengan menyesuaikan platform politiknya agar sesuai dengan tuntutan zaman (Munir, 2020).

Kemampuan partai-partai berbasis Islam ini untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi modern menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia tidak bersifat kaku. Sebaliknya, politik Islam

di Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan politik yang berkembang. Proses ini mencerminkan prinsip ijtihad dalam Islam, yaitu upaya untuk memahami dan menafsirkan ajaran agama sesuai dengan konteks zaman. Dalam sistem demokrasi Indonesia, politik Islam telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas (Nadiran, 2015).

Namun, keberhasilan politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi politik Islam adalah isu radikalisme dan intoleransi. Radikalisme sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem politik dan ekonomi yang dianggap tidak adil. Di Indonesia, kelompok-kelompok radikal menggunakan narasi agama untuk memobilisasi dukungan, yang pada akhirnya menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Isu intoleransi juga menjadi tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Intoleransi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan sering kali menciptakan ketegangan sosial yang dapat merusak harmoni nasional (Sidiq, 2017).

Radikalisme dan intoleransi tidak hanya menjadi tantangan bagi masyarakat secara umum, tetapi juga bagi partai-partai berbasis Islam. Partai-partai ini sering kali menghadapi dilema antara menjaga basis pendukungnya yang konservatif dan memperluas daya tariknya kepada pemilih yang lebih moderat dan pluralis. Dalam menghadapi tantangan ini, partai-partai berbasis Islam di Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan toleran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa politik Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam demokrasi Indonesia.

Selain radikalisme dan intoleransi, tantangan lain yang dihadapi politik Islam di Indonesia adalah citra negatif yang sering kali melekat pada partai-partai berbasis Islam. Dalam beberapa kasus, partai-partai berbasis Islam dianggap lebih fokus pada agenda keagamaan daripada isu-isu nasional yang lebih luas. Persepsi ini sering kali diperkuat oleh media yang cenderung menyoroti isu-isu kontroversial yang melibatkan partai-partai berbasis Islam. Untuk mengatasi tantangan ini, partai-partai berbasis Islam perlu lebih proaktif dalam mengkomunikasikan visi dan misinya kepada publik, serta menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu nasional yang relevan dengan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, di tengah tantangan yang ada, politik Islam di Indonesia juga memiliki peluang besar untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi model bagi dunia Islam dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks ini, politik Islam dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif, toleran, dan progresif, yang tidak hanya relevan bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia internasional (Sulaeman, 2019).

Salah satu langkah penting yang dapat diambil oleh politik Islam di Indonesia adalah memperkuat peran ijtihad dalam menghadapi tantangan modernitas. Dalam Islam, ijtihad adalah proses penafsiran dan pemahaman kembali ajaran agama untuk menjawab isu-isu kontemporer. Dalam konteks politik, ijtihad dapat digunakan untuk menemukan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, ijtihad dapat digunakan untuk menafsirkan ulang konsep syura (musyawarah) dalam Islam agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti partisipasi publik dan pengambilan keputusan kolektif (Syamsul, 2007).

Selain itu, politik Islam di Indonesia perlu mendorong dialog antaragama dan antarbudaya sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan toleransi dan harmoni sosial. Dialog ini tidak hanya penting untuk mengatasi isu-isu intoleransi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks global, dialog antaragama juga dapat membantu memperbaiki citra Islam sebagai agama yang damai dan inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam.

Dalam menghadapi isu radikalisme, politik Islam di Indonesia perlu mengambil pendekatan yang tegas namun konstruktif. Hal ini melibatkan upaya untuk memerangi ideologi radikal melalui pendidikan, kampanye publik, dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Pada saat yang sama, politik Islam juga perlu

mengatasi akar penyebab radikalisme, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dengan mengatasi akar penyebab ini, politik Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, yang pada gilirannya akan mengurangi daya tarik ideologi radikal.

Politik Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan promosi nilai-nilai Islam yang inklusif dan progresif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti radikalisme, intoleransi, dan citra negatif, politik Islam telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem demokrasi modern. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem politik yang pluralis dan demokratis, politik Islam di Indonesia dapat menjadi model bagi dunia Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

Untuk mencapai hal ini, partai-partai berbasis Islam perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempromosikan nilai-nilai inklusif, memperkuat dialog antaragama, dan mengatasi akar penyebab radikalisme. Dengan cara ini, politik Islam tidak hanya dapat berkontribusi secara konstruktif dalam demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi dunia internasional dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera..

Transformasi Politik Islam di Turki

Turki merupakan contoh negara yang berhasil mengintegrasikan politik Islam dengan modernitas melalui model sekularisme yang unik. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan telah menunjukkan bagaimana politik Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan identitas Islam. Namun, kritik terhadap otoritarianisme pemerintah AKP menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan prinsip demokrasi.

Tantangan Globalisasi dan Sekularisasi

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap politik Islam, terutama dalam isu pluralisme dan hak asasi manusia. Banyak negara Muslim menghadapi tekanan untuk mengadopsi nilai-nilai universal seperti kebebasan beragama dan kesetaraan gender, yang sering kali bertentangan dengan interpretasi tradisional ajaran Islam. Sekularisasi juga menjadi tantangan besar karena dapat memisahkan agama dari ranah politik, yang bertolak belakang dengan prinsip dasar politik Islam.

Reinterpretasi sebagai Solusi

Reinterpretasi ajaran Islam menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan modernitas. Dalam konteks ini, ijtihad dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Misalnya, konsep *maqāḥid al-sharī'a* (tujuan syariat) dapat menjadi landasan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.

SIMPULAN

Politik Islam menghadapi tantangan besar di era modernitas, termasuk sekularisasi, globalisasi, dan tuntutan demokratisasi. Namun, politik Islam memiliki potensi untuk beradaptasi melalui reinterpretasi ajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Studi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan keterbukaan terhadap perubahan merupakan kunci keberhasilan politik Islam dalam menghadapi tantangan modernitas.

Dalam konteks Indonesia, transformasi politik Islam dapat dijadikan model untuk negara-negara Muslim lainnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem politik modern. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama, intelektual, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa politik Islam tetap relevan dan konstruktif dalam menjawab tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Arifullah, M. (2015). Paradigma keilmuan Islam: Autokritik dan respons Islam terhadap tantangan modernitas dalam pandangan Ziauddin Sardar.

- Boli, M. (2018). Pendidikan Islam dan tantangan modernitas. *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 143–160.
- Haryati, T. A., & Kosim, M. (2010). Tasawuf dan tantangan modernitas. *Ulumuna*, 14(2), 413–428.
- Huda, S. (2007). Pendidikan Islam dan tantangan modernitas. *Universum*, 1(1), 78–84.
- Ikhwan, M. (2019). Ulama dan konservatisme Islam publik di Bandung Islam, politik identitas, dan tantangan relasi horizontal.
- Krisdiyanto, G., et al. (2019). Sistem pendidikan pesantren dan tantangan modernitas. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 11–21.
- Malli, R. (2021). Urgensi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan modernitas. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 158–175.
- Maarif, M. A. (2016). Pendidikan Islam dan tantangan modernitas (input, proses, dan output pendidikan di madrasah). *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 47–58.
- Munajah, N. (2021). Agama dan tantangan modernitas. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 83–92.
- Munir, M. (2017). Modernisasi pendidikan Islam dalam perspektif Nurcholish Madjid. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 202–222.
- Munir, M. (2020). Pendidikan Islam dan tantangan modernitas. *Jurnal Al-Makrifat*, 5(1).
- Nadiran, H. (2015). Pemikiran kalam Hassan Hanafi: Rekonstruksi epistemologi keilmuan kalam dan tantangan modernitas. *Intizar*, 21(2), 247–259.
- Sidiq, S. (2017). Maqashid syari'ah & tantangan modernitas: Sebuah telaah pemikiran Jasser Auda. *Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7.
- Sulaeman, M. (2019). Permainan bahasa atas tuduhan gerakan fundamentalisme Islam dalam politik barat. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 7(1), 55–72.
- Syamsul, H. (2007). Pendidikan Islam dan tantangan modernitas. *Universum*, 1(1), 78–84.